

**PERSEPSI GURU PPKN TENTANG DINAMIKA KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA ERA REFORMASI DI SMP NEGERI SE-KECAMATAN SLEMAN**

***PERCEPTION OF TEACHER PPKN ABOUT THE DYNAMICS OF THE CIVIC EDUCATION CURRICULUM IN REFORMATION IN JUNIOR HIGH SCHOOL IN THE SUBDISTRICT OF SLEMAN***

**Prichia Deane Putri dan Cholisin, M.Si**

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

[13401241047@student.uny.ac.id](mailto:13401241047@student.uny.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi guru PPKn se-Kecamatan Sleman tentang dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi ditinjau dari segi nama, tujuan, materi, metode dan penilaian.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam memilih subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Subjek dalam penelitian ini sebanyak enam guru PPKn di SMP Negeri se-Kecamatan Sleman yang sudah memenuhi kriteria minimal mengajar sejak tahun 1998. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check*. Analisis data dilakukan dengan logika pendekatan induktif.

Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa, persepsi guru PPKn tentang dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi dari segi nama, tujuan, materi, metode dan penilaian yaitu: 1) perubahan nama digambarkan dalam kategori berubah-ubah menyesuaikan sistem politik dan perubahan nama menjadi lebih tertata. Pola yang muncul perubahan nama mengikuti sistem politik, sehingga tahun 1999 dengan nama PPKn, tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 menggunakan nama PKn, kemudian tahun 2013 menjadi PPKn. 2) perubahan tujuan digambarkan dalam kategori ada perubahan dan tidak ada perubahan. Pola yang muncul tidak ada perubahan tujuan pada kurikulum tahun 1999 tahun 2004, tahun 2006 dan tahun 2013 karena tujuannya hampir sama yaitu membentuk warga negara yang baik. 3) perubahan materi digambarkan dalam kategori materi menyesuaikan dengan sistem politik, ada perubahan materi dan materi hampir sama. Pola yang muncul ada perubahan materi pada PPKn tahun 1999 tentang aspek moral lebih banyak sedangkan PKn tahun 2004 dan 2006 memuat materi ketatanegaraan sedangkan PPKn tahun 2013 mencakup antara Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. 4) perubahan metode digambarkan dalam kategori ada perubahan metode dan metode lebih dikembangkan. Pola yang muncul metode pada kurikulum tahun 1999, 2004 dan 2006 metode yang digunakan lebih banyak ceramah sedangkan pada kurikulum 2013 metode lebih dikembangkan supaya siswa aktif dan guru sebagai fasilitator. 5) perubahan penilaian digambarkan dalam kategori penilaian sederhana dan lebih banyak, penilaian mudah dan rumit. Pola yang muncul penilaian pada kurikulum tahun 1999, tahun 2004 dan tahun 2006 lebih sederhana karena hanya pengetahuan dan sikap sedangkan pada kurikulum 2013 lebih banyak karena ada penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan.

***Kata kunci: Guru PPKn, Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan***

**ABSTRACT**

*This study aims to describe the perceptions of teachers PPKn Subdistrict of Sleman about Civic Education curriculum on the dynamics of the Reformation in terms of name, objectives, content, methods and assessment.*

*This research is descriptive research using qualitative approach. In choosing the subject using a purposive technique. The subject in this study as many as six teachers PPKn in junior high*

*school Subdistrict of Sleman which already meets the criteria of minimal teaching since 1998. Using data collection techniques interviews and documentation. Techniques of examination of the validity of the data using the cross check. Data analysis was done with the logic of inductive approach.*

*The results of the study describe, perceptions of teachers PPKn of dynamics of Civic Education curriculum in the Reformation in terms of its name, objectives, content, methods and assessment are: 1) the change of name is described in the category of fickle adjusting political system and name change became more elaborate. The pattern that emerged following the name change of the political system, for the year 1999 with the name PPKn, the year 2004 up to the year 2006 using the name PKn, then in 2013 become PPKn. 2) changes the purpose described in the category of change and no changes. The patterns that emerge there is no change in the curriculum objectives year 1999 the year of 2004, the year of 2006 and the year of 2013 because the goal is almost the same, namely to form good citizens. 3) material changes described in the category material adapts to the political system, changes are made to the material and the material is almost the same. The pattern that emerges is no material changes on PPKn year 1999 about the moral aspects more while PKn years 2004 and 2006 contain the material attempt while PPKn the year 2013 includes between Civics and Citizenship Education. 4) change the method described in the category there is a change of methods and methods are more developed. The pattern appears in the curriculum methods years 1999, 2004 and 2006 method used more speaking engagements while in 2013 more methods developed curriculum so that students and teachers as facilitators. 5) change the assessment described in the category of simple assessment, valuation and more easy and complicated. The pattern appears in the curriculum assessment year 1999, in 2004 and in 2006 more simple because only knowledge and attitudes while in 2013 curriculum more because there is an assessment of knowledge, attitudes and skills.*

**Keywords:** *teacher PPKn, Civic Education Curriculum*

## PENDAHULUAN

Runtuhnya Orde Baru pada Tahun 1998 dengan lengsernya Suharto sebagai presiden menjadikan bangsa Indonesia memasuki Era Reformasi. Perubahan tersebut tentunya membuat dampak perubahan pada berbagai bidang, salah satunya pendidikan. Sejarah pendidikan pada Era Orde lama dan Orde Baru masih sangat lemah. Paradigma pendidikan yang dianut pada masa Orde Baru adalah pendidikan untuk pembangunan, sehingga pendidikan telah diposisikan sebagai instrumen pembangunan, sehingga pada masa Orde Baru dalam kebijakan dan operasionalnya lebih banyak berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (Muchson, 2004:1).

Pada Era Reformasi perlu adanya perubahan untuk menyempurnakan bidang pendidikan di Indonesia agar lebih berkualitas sehingga menghasilkan generasi yang bermutu dan mampu bersaing dengan negara lain. Salah satu cara yang ditempuh untuk memperbaiki sistem

pendidikan pada Era Reformasi yaitu dengan menyempurnakan kurikulum. Pada Era Reformasi telah mengalami empat kali pergantian kurikulum. Terjadinya empat kali perubahan kurikulum pada Era Reformasi memiliki dampak bagi setiap mata pelajaran termasuk Pendidikan Kewarganegaraan, karena setiap ada perubahan kurikulum yang banyak terjadi pada PPKn jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain.

Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, yang pertama pada kurikulum tahun 1994 memilih mengintegrasikan antara pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nama mata pelajaran PPKN. Model pengembangan materi berdasar pokok bahasan yang berupa nilai, memiliki kelemahan yang tidak memiliki batang keilmuan yang jelas, sehingga sering membingungkan kalangan guru dan akibat lain pengajaran PPKn lebih merupakan indoktrinasi dan

sekedar penataan P4 yang sangat kering dari sifat ilmiah (Cholisin, 2004: 53-54). Sehingga dapat dikatakan bahwa sebelum Era Reformasi kurikulum bersifat sentralistik dan kontennya menunjukkan kepentingan politik rejim (Samsuri, 2009: 65).

Pada tahun 2004 adanya perubahan untuk memperbaiki kurikulum sebelumnya. Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi istilah PPKn kemudian menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn sudah mulai mengarah pada tiga komponen paradigma baru. Ketiga komponen tersebut yang meliputi, *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (keterampilan kewarganegaraan), *civic disposition* (karakter kewarganegaraan) (Murdiono, 2012: 43). Istilah PKn digunakan juga pada kurikulum tahun 2006 yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. PKn yang dikembangkan mengarah pada paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan pada kurikulum sebelumnya (Murdiono, 2012: 45). Dalam kurikulum 2013 ada perubahan nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) karena hendak menghidupkan kembali Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di Era Orde Baru ke dalam kebijakan Kurikulum 2013 (Samsuri, 2013: 5).

Perubahan yang terjadi pada mata pelajaran PPKn terlihat dari nama yang berubah sehingga mempengaruhi tujuan, materi metode dan penilaian. Oleh karena itu, guru PPKn memiliki tantangan yang sangat besar dalam menghadapi dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Pentingnya mengetahui bagaimana persepsi guru PPKn untuk mengoreksi kurikulum yang sebelumnya sehingga lebih mempermudah dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan kedepannya.

Dalam penelitian ini peneliti memilih di Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena jika dilihat kembali pada tahun 2009 Indonesia merupakan salah satu dari 38 negara yang ikut terlibat dan menjadi sampel dalam penelitian *International*

*Civic and Citizenship Studies* (ICCS). Laporan ICCS tentang kondisi Pendidikan Kewarganegaraan di lima tempat negara (Indonesia, Hong Kong SAR, Republik Korea/Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand) menyebutkan bahwa hasil tes pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dan Thailand siswa kelas VIII lebih rendah jika dibandingkan dengan negara sampel lainnya di Asia (Samsuri, 2013:1), sehingga masih banyak kekurangan yang terjadi pada kurikulum PPKn di SMP.

Subjek penelitian ini yaitu guru PPKn di SMP Negeri se-Kecamatan Sleman karena sudah memenuhi kriteria yaitu mengajar sesuai bidang studynya yaitu PPKn dan minimal mengajar selama 19 tahun karena sesuai dengan Era Reformasi yaitu dari tahun 1998. Peneliti memilih tempat penelitian di SMP Negeri se-Kecamatan Sleman karena sekolah tersebut selain memiliki visi dan misi yang berbeda juga sudah menerapkan kurikulum 2013, sehingga guru dapat mengetahui mengenai perkembangan kurikulum yang terjadi pada tahun 1999, kurikulum tahun 2004, kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013. Setiap sekolah di SMP Negeri se-Kecamatan Sleman dalam menerapkan kurikulum 2013 pada waktu yang berbeda-beda. Di SMP Negeri 1 Sleman dari tahun 2014, SMP Negeri 2 Sleman, SMP Negeri 3 Sleman dan SMP 4 Sleman pada tahun 2016 sedangkan di SMP 5 Sleman mulai tahun 2017. Perbedaan setiap sekolah dalam melaksanakan kurikulum 2013 tentunya dapat mempengaruhi persepsi dari masing-masing guru PPKn, sehingga hal ini menarik karena setiap persepsi dari guru akan berbeda-beda.

Peneliti mengambil satu orang guru sebagai subjek penelitian di setiap sekolah kecuali di SMP Negeri 1 Sleman karena sekolah ini merupakan satu-satunya SMP Negeri di Kecamatan Sleman yang sudah menerapkan kurikulum 2013 sejak awal sehingga menjadi percontohan bagi sekolah lain, sehingga persepsi guru PPKn tentunya sedikit berbeda dengan guru PPKn sekolah lain yang baru memulai kurikulum 2013



pada tahun 2016 atau 2017. Oleh karena itu perlu adanya dua guru PPKn sebagai subjek penelitian di SMP Negeri 1 Sleman untuk dapat mempertimbangkan tentang kurikulum 2013. Jadi jumlah subjek penelitian ini yaitu enam guru PPKn yang tersebar di SMP Negeri se-Kecamatan Sleman. Berdasarkan uraian tersebut menjadi alasan peneliti untuk meneliti “Persepsi Guru PPKn tentang Dinamika Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi di SMP Negeri se-Kecamatan Sleman”.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari makna dan memahami fenomena tentang persepsi guru PPKn tentang dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi.

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri se-Kecamatan Sleman. Ada 5 SMP Negeri di Kecamatan Sleman yang pertama SMP Negeri 1 Sleman, SMP Negeri 2 Sleman, SMP Negeri 3 Sleman, SMP Negeri 4 Sleman, SMP Negeri 5 Penelitian di SMP Negeri se Kecamatan Sleman dilaksanakan pada bulan Juli 2017 sampai September 2017.

Dalam memilih subjek penelitian, peneliti menggunakan *purposive* karena dalam penelitian peneliti memiliki pertimbangan bahwa subjek penelitian harus termasuk dalam kriteria. Kriteria tersebut adalah seorang guru PPKn yang mengajar sesuai dengan bidang studinya yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan sudah mengajar minimal sejak tahun 1998, sehingga diharapkan guru tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman banyak mulai dari Kurikulum Suplemen 1999, kurikulum 2004, kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Dalam penelitian ini menggunakan enam subjek penelitian yaitu guru PPKn SMP Negeri se-Kecamatan Sleman.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan wawancara untuk

memperoleh data mengenai persepsi guru PPKn tentang dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi yaitu dari kurikulum Tahun 1999, Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan hingga Kurikulum terbaru yaitu Kurikulum 2013. Sedangkan dokumen yang didapatkan oleh peneliti adalah data-data yang ada kaitannya dengan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi untuk memperkuat tentang data-data yang sudah diperoleh dari wawancara.

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *cross check* data. Teknik ini digunakan untuk melakukan pengecekan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika pendekatan induktif. Peneliti memulai penelitiannya dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari para partisipan, lalu membentuk informasi ini menjadi kategori-kategori atau tema-tema tertentu. Dari tema-tema ini kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya diperbandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi dengan literatur yang ada (Cresswell, 2010: 96). Dengan menggunakan logika pendekatan induktif dapat mempermudah peneliti dalam menjawab dari setiap rumusan masalah penelitian.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Persepsi guru PPKn tentang dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi dari segi nama**

Pada Era Reformasi kurikulum telah mengalami empat kali pergantian yang pertama pada tahun 1999, kedua pada tahun 2004, ketiga pada tahun 2006 dan yang terakhir pada tahun 2013. Hal tersebut tentunya membuat perubahan pada setiap mata pelajaran salah satunya Pendidikan Kewarganegaraan. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sangat dinamis karena mata pelajaran tersebut mengikuti sistem

politik sehingga mengakibatkan adanya perubahan salah satunya pada nama.

Dari hasil penelitian menurut para subjek penelitian yaitu perubahan nama sangat mempengaruhi materi karena selalu berkembang mengikuti sistem politik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Pada Era Reformasi sudah mengalami empat kali pergantian kurikulum dan sudah tiga kali adanya perubahan nama pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pertama tahun 1999 dengan nama PPKn selanjutnya pada kurikulum tahun 2004 sampai dengan kurikulum tahun 2006 menggunakan nama PKn. Kemudian pada kurikulum 2013 kembali menjadi PPKn.

Perubahan nama Pendidikan Kewarganegaraan menurut para subjek penelitian jika di *cross cek* dengan sumber menurut para ahli sesuai. Pertama kali pada Kurikulum tahun 1994, sebagai salah satu upaya dalam menjelaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, memilih mengintegrasikan antara penagajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nama mata pelajara PPKN hingga kurikulum tahun 1999 (Cholisin, 2004: 53). Perubahan kurikulum pada tahun 2004 dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi istilah PPKn kemudian menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (Murdinono, 2012: 43). Istilah PKn digunakan juga pada kurikulum tahun 2006 yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dalam kurikulum 2013 ada perubahan nama kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena hendak menghidupkan kembali Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di Era Orde Baru ke dalam kebijakan Kurikulum 2013 (Samsuri, 2013: 5).

Dapat diketahui bahwa perkembangan nama pada Pendidikan Kewarganegaraan sangat dinamis karena harus mengikuti sistem politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia sehingga selalu berubah-ubah. Pada Era Reformasi sudah mengalami empat kali pergantian kurikulum dan sudah tiga kali adanya perubahan nama pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pertama Tahun 1999 dengan nama PPKn selanjutnya pada kurikulum 2004 sampai dengan kurikulum 2006 menggunakan nama PKn. Kemudian pada kurikulum 2013 kembali menjadi PPKn dan istilah Pancasila dimunculkan kembali.

#### **b. Persepsi guru PPKn tentang dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi dari segi tujuan**

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang penting diberikan kepada peserta didik, karena tujuan mata pelajaran ini dapat membentuk karakter warga negara yang baik yang mengerti akan hak dan kewajibannya. Dari hasil penelitian menurut para subjek penelitian tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sama untuk membentuk warga negara yang baik yang mengetahui akan hak dan kewajibannya serta dapat melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perubahan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut para subjek penelitian jika di *cross cek* dengan sumber menurut para ahli sesuai karena menurut Aziz Wahab tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah membentuk warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara (Wahab Aziz dan Sapriya, 2011: 311).

Meskipun adanya perubahan nama Pendidikan Kewarganegaraabpada Era Reformasi dari PPKn tahun 1999, PKn tahun 2004 hingga 2006 dan sekarang kembali menjadi PPKn pada tahun 2013 perubahan pada tujuan tidak memiliki pengaruh yang banyak karena tujuan utamanya yaitu untuk membentuk warga negara yang baik yang mengetahui akan hak dan kewajibannya serta dapat melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **c. Persepsi guru PPKn tentang dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi dari segi materi**

Materi pada kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sangat dinamis hal ini karena Pendidikan Kewarganegaraan itu terdiri dari aspek politik, sehingga mata pelajaran ini selalu berubah-ubah karena harus mengikuti sistem politik yang berkembang. Dari hasil penelitian menurut para subjek penelitian bahwa perubahan materi pada Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi mulai dari PPKn tahun 1999 materi tentang aspek moral lebih banyak sedangkan PKn tahun 2004 dan 2006 memuat materi ketatanegaraan dan politik jadi lebih banyak aspek kognitif sedangkan PPKn tahun 2013 mencakup antara Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sehingga lebih seimbang.

Perubahan materi Pendidikan Kewarganegaraan menurut para subjek penelitian jika di *cross cek* dengan sumber menurut para ahli PPKn tahun 1999 materi berdasar pokok bahasan yang berupa nilai, memiliki kelemahan yang tidak memiliki batang keilmuan yang jelas, sehingga sering membingungkan di kalangan guru dan akibat lain pengajaran PPKn lebih merupakan indoktrinasi dan sekedar penataan P4 yang sangat kering dari sifat ilmiah (Cholisin, 2004: 54). Selanjutnya pada tahun 1999 dimasukan suplemen (tambahan) materi PPKn sesuai dengan perubahan kehidupan ketatanegaraan setelah Reformasi (Murdino, 2012: 42).

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi PKn sudah mulai mengarah pada tiga komponen paradigma baru yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (keterampilan kewarganegaraan), *civic disposition* (karakter kewarganegaraan). Materi yang dikembangkan mengarah pada upaya membekali warga negara dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar menjadi warga negara yang baik (Murdinono, 2012: 43). Meskipun pada kurikulum 2004 dan 2006 hanya menggunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan tetapi dimanapun yang namanya PKn harus mengandung nilai-nilai dasar sebagai persyaratan kehidupan

bersama yang dicita-citakan. Ini berarti Pendidikan Pancasila sudah termasuk dalam PKn (Cholisin, 2004:9). Selanjutnya PPKn dalam Kurikulum 2013 lebih dikembangkan dengan memuat kehidupan Berbangsa dan Bernegara meliputi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Samsuri, 2013:5).

Perubahan materi pada Pendidikan Kewarganegaraan sangat berbeda sekali dengan Era sebelum Reformasi. Sebelum Era Reformasi mata pelajaran ini dijadikan sebagai alat indoktrinasi sehingga ada pendangkalan pada materi karena tidak disampaikan secara transparan tetapi sekarang ini sudah Reformasi tentunya sudah transparan. Perubahan materi pada kurikulum tahun 1999 merupakan penyempurnaan dari kurikulum tahun 1994, meskipun materi lebih banyak memuat tentang aspek moral tetapi sudah sesuai dengan perubahan kehidupan ketatanegaraan setelah Reformasi. Pada kurikulum 2004 dan 2006 materi pada PKn hampir sama lebih memuat tentang Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun dalam PKn tidak menggunakan istilah Pancasila tetapi tetap dalam ruang lingkup PKn mengandung nilai-nilai Pancasila. Pada PPKn kurikulum 2013 materi tentang Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam hal ini Pendidikan Pancasila lebih ditonjolkan supaya anak lebih mengetahui Ideologi bangsanya dan dapat memahami, menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik sesuai Pancasila.

Perubahan pada materi antara PPKn dengan PKn tentunya mengikuti perkembangan jaman karena mata pelajaran ini ada kaitannya dengan sistem pemerintahan dan politik sehingga sangat dinamis. Meskipun dalam PKn tidak menggunakan istilah Pancasila tetapi tetap dalam ruang lingkup PKn mengandung nilai-nilai Pancasila. Pada PPKn di kurikulum 2013 sekarang materi Pancasila lebih ditonjolkan supaya anak lebih mengetahui Ideologi bangsanya dan dapat



memahami, menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik sesuai dengan Pancasila.

#### **d. Persepsi guru PPKn tentang dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi dari segi metode**

Metode adalah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Penggunaan metode dalam proses pembelajaran adalah untuk mengoptimalkan daya serap para peserta didik dapat memahami materi yang diberikan dan untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu (Janawi, 2013:70). Dari hasil penelitian menurut para subjek penelitian bahwa perubahan metode pada kurikulum tahun 1999, 2004 dan 2006 guru sebagai satu-satunya sumber dan metode yang digunakan lebih banyak ceramah sedangkan pada kurikulum 2013 guru harus lebih kreatif yaitu dengan mengembangkan metode karena sekarang siswa harus lebih aktif dan guru sebagai fasilitator.

Perubahan metode Pendidikan Kewarganegaraan menurut para subjek penelitian jika di *cross cek* dengan sumber menurut para ahli pada tahun 1999, di Indonesia mulai diperkenalkan metode pembelajaran PKN yang dikembangkan dari metode inkuiri. Metode pembelajaran yang dimaksud dinamakan Model Pembelajaran PKN berbasis portofolio. Pembelajaran PKN yang berbasis portofolio merupakan metode pembelajaran untuk pembentukan warga negara demokratis, yakni cara pembelajaran anak didik dengan mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional dan sosial, mengembangkan tanggung jawab warga negara, dan mengembangkan anak didik berpartisipasi sebagai warga negara guna menopang tumbuh dan berkembangnya warga negara yang baik (Wahab Aziz dan Sapriya, 2011: 345-346).

Sedangkan dalam kurikulum 2013 karena sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup

pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (*scientific*), perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan atau penelitian (*Discovery/Inquiry Learning*). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*Project Based Learning*) (Permen No 58 Tahun 2014).

Jadi perubahan metode pada Pendidikan Kewarganegaraan karena mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin maju sehingga siswa dituntut untuk lebih aktif dan kreatif. Salah satunya dengan mengembangkan metode supaya siswa aktif dan pembelajaran tidak monoton. Metode sudah dikembangkan sejak dulu tetapi guru masih banyak yang menggunakan metode ceramah meskipun dengan pendekatan pendekatan kontekstual anak sebagai objek pembelajaran siswa tetap aktif melalui *Problem Based Learning*. Sekarang ini pada kurikulum 2013 adanya perubahan pendekatan *saintifik* guru dituntut lebih kreatif dalam menggunakan dan mengembangkan metode supaya dapat membuat siswa aktif dikelas dan guru hanya sebagai fasilitator.

### e. Persepsi guru PPKn tentang dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi dari segi penilaian

Penilaian dilakukan untuk memperoleh informasi dari hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dari hasil penelitian menurut para subjek penelitian bahwa penilaian pada kurikulum tahun 1999, tahun 2004 dan tahun 2006 hanya penilaian pengetahuan dan sikap, sehingga penilaian lebih sederhana, selain itu semua penilaian tersentral pada guru. Sedangkan kurikulum 2013 lebih banyak mulai dari pengetahuan, sikap dan keterampilan selain itu semua proses dari awal hingga akhir dinilai. Pada penilaian sikap menggunakan jurnal dan observasi serta dalam penilaian sikap siswa sendiri yang menilai yang terdiri dari penilaian diri dan penilaian antar teman dan ini hanya sebagai penunjang guru untuk memberikan nilai sikap.

Perubahan metode Pendidikan Kewarganegaraan menurut para subjek penelitian jika di *cross cek* dengan sumber yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang karakteristik kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi:

- 1) Pemahaman akan hak dan kewajiban diri sebagai warga negara, yaitu aspek kognitif sebagai hasil belajar mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan.
- 2) Kepribadian, yaitu beberapa aspek kepribadian sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum.
- 3) Perilaku berkepribadian, yaitu berbagai bentuk perilaku sebagai penerjemahan dimilikinya ciri-ciri kepribadian warga negara Indonesia.

Sedangkan dalam kurikulum 2013 penilaian pada kurikulum 2013 yaitu penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan atau teknik

lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai (Permendikbud No 23 Tahun 2016).

Perubahan penilaian sebelum menggunakan kurikulum 2013 yaitu kurikulum tahun 1999, tahun 2004 dan tahun 2006 lebih sederhana karena hanya penilaian pengetahuan dan sikap serta semua tersentral pada guru yang menilai. Sedangkan penilaian pada kurikulum 2013 lebih kompleks yang terdiri dari penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan serta tidak tersentral pada guru sehingga pada penilaian sikap siswa bisa menilai dirinya sendiri bahkan temannya. Perubahan penilaian tersebut karena perkembangan zaman semakin maju dan sikap warga negara mulai menurun sehingga perlunya fokus pada penilaian sikap. Penilaian sikap itu sangat penting supaya siswa dapat memiliki karakter dan berperilaku lebih baik.

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai persepsi guru PPKn tentang dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi di SMP Negeri se-Kecamatan Sleman ditinjau dari segi nama, tujuan, materi, metode dan penilaian, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Persepsi guru PPKn tentang dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi dari segi nama

Perubahan nama pada Pendidikan Kewarganegaraan sangat dinamis karena harus mengikuti sistem politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia sehingga selalu berubah-ubah. Pada Era Reformasi sudah mengalami empat kali pergantian kurikulum dan sudah tiga kali mengalami perubahan nama pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pertama tahun 1999 dengan nama PPKn selanjutnya pada kurikulum tahun 2004 sampai dengan kurikulum tahun 2006 menggunakan nama PKn. Kemudian pada kurikulum 2013 kembali menjadi PPKn dan istilah Pancasila dimunculkan kembali.

#### 2. Persepsi guru PPKn tentang dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi dari segi tujuan



Perubahan nama Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi dari PPKn tahun 1999, PKn tahun 2004 hingga 2006 dan sekarang kembali menjadi PPKn pada tahun 2013 perubahan tersebut tidak memiliki pengaruh yang banyak pada tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, karena tujuan utamanya yaitu untuk membentuk warga negara yang baik yang mengetahui akan hak dan kewajibannya serta dapat melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **3. Persepsi guru PPKn tentang dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi dari segi materi**

Pada Era Reformasi sudah mengalami empat kali pergantian kurikulum sehingga terjadi perubahan salah satunya pada materi. Perubahan materi pada kurikulum tahun 1999 merupakan penyempurnaan dari kurikulum tahun 1994, meskipun materi lebih banyak tentang aspek moral tetapi sudah sesuai dengan perubahan kehidupan ketatanegaraan setelah Reformasi. Pada kurikulum 2004 dan 2006 materi PKn hampir sama lebih memuat tentang Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun dalam PKn tidak menggunakan istilah Pancasila tetapi tetap dalam ruang lingkup PKn mengandung nilai-nilai Pancasila. PPKn kurikulum 2013 materi tentang Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam hal ini Pendidikan Pancasila lebih ditonjolkan supaya anak lebih mengetahui Ideologi bangsanya dan dapat memahami, menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik sesuai Pancasila.

### **4. Persepsi guru PPKn tentang dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi dari segi metode**

Perubahan metode pada Pendidikan Kewarganegaraan karena perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin maju sehingga siswa dituntut untuk lebih aktif dan kreatif. Pada kurikulum tahun 1999, tahun 2004 dan tahun 2006 guru lebih banyak menggunakan metode ceramah meskipun

metode sudah dikembangkan oleh para ahli sejak zaman dulu. Oleh karena itu, metode sebelum kurikulum 2013 belum berkembang karena guru masih dominan saat mengajar sehingga guru lebih aktif dan siswa pasif. Pada kurikulum 2013 adanya perubahan pendekatan *saintifik* siswa bukan lagi sebagai objek pembelajaran tetapi subjek pembelajaran, sehingga guru dituntut lebih kreatif dalam mengembangkan metode supaya siswa aktif dikelas dan guru hanya sebagai fasilitator.

### **5. Persepsi guru PPKn tentang dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi dari segi penilaian**

Perubahan penilaian pada kurikulum tahun 1999, tahun 2004 dan tahun 2006 lebih sederhana karena hanya penilaian pengetahuan dan sikap serta semua tersentral pada guru yang menilai. Sedangkan penilaian pada kurikulum 2013 lebih kompleks yang terdiri dari penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan serta tidak tersentral pada guru yang menilai, sehingga pada penilaian sikap siswa bisa menilai dirinya sendiri bahkan temannya. Perubahan penilaian karena perkembangan zaman semakin maju dan sikap warga negara mulai menurun sehingga perlu fokus pada penilaian sikap supaya siswa dapat berperilaku lebih baik.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari persepsi guru PPKn tentang dinamika kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Reformasi di SMP Negeri se-Kecamatan Sleman, maka peneliti memiliki sumbang saran yang sekiranya nanti dapat dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang akan datang. Sumbangan saran tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Guru**

Guru harus merubah *mindset* agar selalu siap dalam menghadapi perubahan kurikulum karena kurikulum itu sifatnya dinamis sehingga pasti akan berubah mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Kurikulum 2013 saat ini berbeda

dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya sehingga guru dituntut harus lebih kreatif dan inovatif serta dapat menguasai perkembangan teknologi yang semakin canggih.

## 2. Bagi Pemerintah

Kepada Pemerintah pusat maupun daerah dalam merubah kurikulum juga harus melihat kondisional dilapangan apakah kira-kira kurikulum itu dapat diterapkan atau tidak, karena karakter sekolah itu berbeda-beda. Selain itu jangka waktu dalam perubahan kurikulum juga diperhatikan jangan terlalu cepat karena dampaknya pada guru yang belum siap dalam menghadapi perubahannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cholisin. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Diklat. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial UNY.
- Cresswell, Jhon W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Janawi. 2013. *Metodologi dan Pendekatan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ombak.
- Muchson AR. 2004. "Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru". Jurnal Civic. Vol.1, No. 1 Juni 2004.
- Murdiono, Mukhamad. 2012. *Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan*: Yogyakarta: Ombak.
- Samsuri. 2009. "Pembaharuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia Pasca- 1998". Jurnal Civic. hal 65. April 2009.
- \_\_\_\_\_. 2013. "Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013". Kuliah Umum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. 15 September 2013.
- Wahab, Aziz dan Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional.
- Permendikbud No 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah.
- Permendikbud No 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.